

Peran Investasi Asing Texas Pacific Group (TPG) di Bank BTPN Terhadap Pemberdayaan Perempuan Indonesia: Studi Kasus Kredit Mikro BTPN 2008 - 2012

*The Role of Texas Pacific Group (TPG) Foreign Investment in BTPN Bank on
the Empowerment of Indonesian Women: A Case Study of BTPN Micro Credit
2008 - 2012*

Arie Susanto, Setyasih Harini, S.IP, M.Si., Hasna Wijayati, S.IP, MA.

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas
Slamet Riyadi Surakarta

arie.susantoo@gmail.com, setyasih.rini@gmail.com,

Abstrak

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menekan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu diperlukan upaya terstruktur dan berkelanjutan demi terciptanya pemberdayaan perempuan di Indonesia terlebih fakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW. Upaya menuju terciptanya perempuan berdaya merupakan proses yang dilakukan oleh seluruh elemen dalam sebuah negara. Keberadaan investasi asing yang dilakukan Texas Pacific Group (TPG) di Bank BTPN membuka kesempatan bagi perempuan pada umumnya dan perempuan pengusaha mikro menuju berdaya melalui kredit yang disalurkan. Keberadaan TPG di BTPN antara tahun 2008 - 2012 mengubah arah bisnis yang awalnya melayani nasabah pensiunan ke pasar kredit mikro di mana sektor usaha mikro di dominasi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan sumber data primer berupa laporan tahunan BTPN dan TPG dan data, laporan, serta publikasi yang diterbitkan oleh TPG dan BTPN. Sumber data sekunder juga peneliti gunakan untuk menganalisis melakukan reduksi dan verifikasi data. Untuk hal itu peneliti menggunakan kajian teori feminisme dan teori modernisasi yang memiliki kesesuaian dengan tema pemberdayaan perempuan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini antara lain; (1) keberadaan investasi asing TPG di BTPN periode 2008 - 2012 membawa kebijakan bisnis baru yang berdampak langsung bagi perempuan di Indonesia melalui pemberian kredit yang ramah perempuan; (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi usaha mikro perempuan melalui serangkaian pelatihan memiliki peran vital bagi pemberdayaan perempuan Indonesia itu sendiri.

Kata kunci: Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan,
Investasi Asing, Kredit Mikro

Abstract

Various efforts have been made by the Indonesian government to reduce gender inequality between men and women. For this reason, structured and sustainable efforts are needed for the creation of women's empowerment in Indonesia, especially the fact that Indonesia has ratified the CEDAW Convention. Efforts to create empowered women are processes carried out by all elements in a country. The existence of foreign investment by the Texas Pacific Group (TPG) in Bank BTPN opens opportunities for women in general

and women micro-entrepreneurs to become empowered through loans. The existence of TPG in BTPN between 2008 - 2012 changed the direction of the business from serving retired customers to the micro credit market where the micro business sector was dominated by women. This study uses a descriptive-qualitative method with primary data sources in the form of annual reports from BTPN and TPG and data, reports, and publications published by TPG and BTPN. The researchers also used secondary data sources to analyze and perform data reduction and verification. For this reason, the researcher uses a study of feminism theory and modernization theory which is in accordance with the theme of women's empowerment being studied. The results of this study include; (1) the presence of TPG foreign investment in BTPN for the period 2008 - 2012 brought new business policies that had a direct impact on women in Indonesia through the provision of women-friendly loans; (2) Improving the quality of human resources for women's micro-enterprises through a series of trainings has a vital role in empowering Indonesian women themselves.

Keywords: *Women Empowerment, Women's Economic Empowerment, Foreign Investment, Micro-credit*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan pada dasarnya harus memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti yang dijelaskan oleh Harini (2019) bahwa ketidaksetaraan gender dalam ekonomi menjadikan perempuan semakin terperdaya dalam kungkungan kultur patriarki sehingga mudah terjerumus dalam kemiskinan sehingga diperlukan adanya pemberdayaan secara sosial ekonomi. Perbedaan peran, status tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan seperti ini kerap menciptakan ketidakadilan.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discriminating against Women) berdasarkan UU RI No 7 Tahun 1984 memiliki kewajiban untuk mengamalkan isi dari konvensi tersebut (Komnas Perempuan, 2018). Perjanjian ini mengikat jika sudah diratifikasi oleh negara, yang berarti

negara wajib mengakui hak, melaksanakan perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi dan terikat pada sistem pemantauan dan pelaporan internasional. CEDAW menjabarkan tentang prinsip-prinsip hak asasi perempuan, norma-norma dan standar kewajiban, serta tanggung jawab dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Konvensi CEDAW disusun dalam enam bagian dengan 30 pasal di dalamnya. Terdapat dua pasal dalam Konvensi CEDAW yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini, yaitu pasal 11 dan 13. Bunyi dalam pasal 11 Konvensi CEDAW sebagai berikut, "*the right to work for women as 'an unalienable right of all human beings.' It requires equal pay for equal work, the right to social security, paid leave and maternity leave 'with pay or with comparable social benefits without loss of former employment, seniority or social allowances.' Dismissal on the grounds of maternity, pregnancy or status of marriage shall be prohibited with sanction*".

Pada pasal 11 Konvensi CEDAW membicarakan tentang pemberdayaan perempuan secara ekonomi. Di dalamnya terdapat aturan di mana upah perempuan dan laki-laki harus sama dengan mata pencaharian yang sama, sistem jaminan keamanan sosial, dan upah selama masa cuti mengandung dan melahirkan. Diatur pula mengenai adanya tunjangan sosial bagi pekerja perempuan sesuai dengan tingkat karir atau durasi kerja tertentu. Pemberhentian kerja atas dasar kehamilan, persalinan atau status pernikahan dilarang dengan sanksi. Bila pasal 11 tersebut lebih mengatur tentang perempuan sebagai pekerja, maka berikut ini merupakan bunyi dalam pasal 13 Konvensi CEDAW pada aspek yang lebih luas,

"Guarantees equality to women 'in economic and social life', especially with respect to 'the right to family benefits, the right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit, and the right to participate in recreational activities, sports and all aspects of cultural life."

Garis besar pasal 13 yang membicarakan perihal kesetaraan dalam kehidupan ekonomi dan sosial, di mana di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pinjaman bank, pinjaman rumah, dan kredit dalam bentuk lain. Meski telah meratifikasi konvensi CEDAW, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat disparitas upah pekerja perempuan dan laki-laki. Disparitas tersebut dapat menjadi acuan sampai tahap mana proses pemberdayaan perempuan setelah

ratifikasi Konvensi CEDAW sebagaimana bunyi pasal 11, 'equal pay for equal work' atau upah yang setara untuk pekerjaan yang sama. Berikut merupakan tabel rata-rata upah atau gaji bersih (Rupiah) buruh atau karyawan selama sebulan menurut daerah tempat tinggal dan jenis kelamin tahun 2010.

Tabel 1. Rata-Rata Upah Buruh Perempuan Dibanding Laki-Laki

Daerah Tempat Tinggal	Perempuan	Laki-Laki
Perkotaan	1.307.374	1.715.910
Pedesaan	936.203	1.205.379

Sumber: BPS RI - Sakernas Agustus 2010

Gambaran yang di atas mengindikasikan masih adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat mengindikasikan adanya ketidakadilan gender. Istilah 'gender' digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya bawaan ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berdasarkan karakteristik sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kepercayaan masyarakat. Contoh masyarakat Jawa yang memandang perempuan tidak pantas untuk berperan sebagai pemimpin dalam suatu pekerjaan. Hal ini tidak terlepas dari figur perempuan yang terlalu

menggunakan perasaan sehingga sulit untuk mengambil keputusan secara bijak (Tuwu, 2018).

Usaha untuk memberdayakan perempuan dapat dilakukan salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi. Keberhasilan Muhammad Yunus, di Bangladesh dengan Grameen Bank, dengan skema kredit mikro ramah perempuannya terbukti mampu memberdayakan perempuan pengusaha mikro. Yunus meyakini bahwa perempuan memegang peranan penting dalam mentransfer manfaat kredit mikro yang tersalur ke keluarga dan lebih lanjut ikut berperan mengentaskan keluarga dari kemiskinan. Di Indonesia, komitmen diselenggarakan kredit ramah bagi perempuan merupakan rekomendasi Komite CEDAW pada tahun 2011. Rekomendasi ini akan turut berdampak pada program pembangunan berkelanjutan khususnya tentang poin kelima yaitu kesetaraan gender.

Pembangunan berbasis manusia (*people centered development*) melalui pendekatan dari bawah (*bottom up*) adalah strategi inisiatif yang dipandang mampu memberdayakan. Program kredit mikro merupakan strategi untuk mengangkat masyarakat agar terlepas dari kemiskinan, memberdayakan masyarakat miskin. Kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada masyarakat miskin untuk membiayai usaha atau proyek yang mereka kerjakan sendiri untuk menghasilkan pendapatan yang lebih baik (Woller dalam

Suwastini, 2012). Program ini diselenggarakan baik oleh pemerintah melalui lembaga-lembaganya maupun bank atau lembaga pembiayaan atau pihak swasta dalam penerapannya.

Harapan dari program kredit mikro ini adalah mampu menjadi gerakan agar kelompok masyarakat yang termarjinalkan, yaitu masyarakat miskin khususnya perempuan dapat memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Lebih lanjut program ini diharapkan menjadi program yang mampu memberdayakan perempuan dalam memperbaiki kualitas hidup mereka, mengembangkan pengetahuan dan kompetensi yang sasaran utamanya berpartisipasi aktif baik secara ekonomi maupun sosial. Seringkali faktor modal merupakan penghalang besar bagi kaum miskin dan perempuan karena berbagai hal, seperti tidak memiliki akses sama sekali terhadap keuangan dan modal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka skema pemberian kredit mikro yang ramah bagi kelompok yang termarjinalkan ini diperlukan. Hal ini untuk membantu mereka keluar dari kondisi miskin. Namun berbagai faktor yang ada menyebabkan kelompok perempuan khususnya perempuan pengusaha mikro tidak dapat akses perbankan atau modal yang ramah lagi memadai. Bahwa kenyataannya usaha berskala besar memiliki akses yang mudah untuk kredit perbankan, sementara usaha mikro seringkali bangkrut karena faktor modal yang minim

untuk menjalankan usaha bahkan tak dapat memulai karena kurangnya akses ke modal.

Faktor ketersediaan modal atau pembiayaan pengusaha UMK merupakan hal yang krusial. Banyak calon pengusaha UMK yang mentok sampai di ide tanpa pernah merealisasikan ide tersebut menjadi usaha karena faktor modal. Sebab itu faktor modal atau pembiayaan digunakan untuk memulai usaha serta untuk mengembangkan usaha bagi para pelaku UMK ke depannya. Beberapa sumber pembiayaan yang umum digunakan oleh pengusaha UMK adalah modal mandiri, modal gabungan bersama mitra usaha, bank, dan lembaga pembiayaan non-bank (Smesco, 2020). Sebagaimana gambaran umum dari bias gender yang ada dan data pengusaha UMK yang menunjukkan adanya jumlah cukup sebanding antara laki-laki dan perempuan, salah satu langkah memberdayakan perempuan adalah melalui pemberdayaan ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu jalan untuk memberdayakan perempuan, utamanya perempuan pengusaha UMK. Dalam hal ini, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) merupakan salah satu bank yang memiliki program penyaluran kredit untuk pengusaha UMK di Indonesia. Pada akhir 2008 BTPN telah mengembangkan usahanya di pangsa pasar usaha mikro kecil dan unit usaha syariah (BTPN, 2008). Sementara BTPN menyalurkan kredit mikro ini sejalan setelah perusahaan

diakuisisi oleh Texas Pacific Group (TPG), sebuah perusahaan investasi asal Amerika Serikat pada 2008. BTPN yang awalnya melayani kegiatan perbankan nasabah pensiunan saja pada 2008 BTPN mulai menggarap pembiayaan mikro, kecil, dan menengah (BTPN, 2008).

Jerry Ng selaku Direktur Utama BTPN pada laporan tahunan (2008) yaitu TPG tetap berkomitmen atas pengembangan usaha inti BTPN yaitu kredit pensiun namun juga memberikan dukungan penuh arah strategi BTPN yang baru yaitu mendorong proses transformasi pembentukan usaha inti baru yaitu BTPN Mitra Usaha Rakyat dan Unit Usaha Syariah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini.

Hal inilah yang menyebabkan peneliti menggunakan batas tahun 2008 hingga 2012 sebagai batas tahun hadirnya TPG di BTPN yang fokus utamanya adalah melayani nasabah ritel khususnya pengusaha mikro dan kecil. Karena fokus utamanya adalah pemberdayaan secara ekonomi maka peran BTPN melalui kredit mikro yang disalurkan menjadi krusial yang ingin diteliti. Karena dalam sebuah kegiatan usaha faktor ketersediaan modal adalah salah satu faktor penting dalam tumbuh kembangnya usaha tersebut.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk

menjelaskan secara langsung peran investasi yang dilakukan Texas Pacific Group dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia periode 2008 - 2012. Merujuk pada sumber data utama yaitu laporan tahunan BTPN pada 2008 - 2012. Fakta dan kejadian yang terjadi pada fokus penelitian yaitu tahun 2008 - 2012 akan menjadi data yang peneliti gunakan untuk menjawab masalah yang dibahas pada penelitian ini. (Sugiono, 2015) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan. Peneliti dalam penelitian ini melakukan pengumpulan dan analisis data yang relevan dengan topik penelitian lalu melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Pada analisisnya terhadap data-data tersebut, peneliti melakukan intrepetasi data mengacu pada data-data yang dikumpulkan lalu dibandingkan dengan data lain yang kredibel. Data hasil intrepetasi dan perbandingan tersebut akan menghasilkan data dan fakta yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Data yang penulis maksud utamanya yaitu Laporan Tahunan Bank BTPN dan TPG periode 2008 - 2012 serta sumber data lain yang relevan dengan penelitian penulis.

2. Sumber Data

Data primer penulis ambil dari publikasi dan penelitian internal Bank BTPN dan TPG, laporan tahunan laporan kuartalan Bank BTPN dan

TPG periode 2008 - 2012. Penulis juga menggunakan publikasi dan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, peneliti menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak dari sumbernya langsung. Data ini peneliti peroleh dari hasil dokumentasi artikel media massa, jurnal dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya yang sesuai dengan tema utama penelitian ini. Seluruh data yang terkumpul penulis evaluasi terlebih dulu, berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data serta terkait dengan latar belakang yang penulis angkat dalam penelitian ini.

3. Objek Penelitian

Berfokus pada bagaimana dampak investasi yang dilakukan Texas Pacific Group pada Bank BTPN terhadap pemberdayaan Indonesia periode 2008 - 2012. Sebagai bank yang berdiri sejak tahun 1958 hingga kini, Bank BTPN telah mengalami pergantian bisnis utama dari mulai bank yang hanya melayani pensiunan militer, pensiunan pegawai negeri sipil, melayani segmentasi pembiayaan mikro kecil menengah. Sementara penelitian ini berfokus pada implementasi program kredit mikro yang dilakukan oleh BTPN dalam rangka pemberdayaan perempuan di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mendokumentasikan data-data yang telah ada dari sumber primer maupun sekunder. Studi dokumentasi ini penulis dapatkan

dari berbagai sumber utama yaitu laporan tahunan BTPN dan TPG. Umumnya dalam laporan tahunan terdapat visi misi perusahaan, fokus pengembangan bisnis, laporan keuangan, dan laporan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) sebab itu penulis memahami pentingnya dokumentasi laporan tahunan ini dalam penelitian yang diambil. Pengumpulan data melalui online juga penulis lakukan untuk mengumpulkan berita online dari media massa, artikel, dan jurnal terkait untuk menjawab latar belakang dari masalah yang penulis ambil. Studi dokumentasi terkait pemberdayaan perempuan di Indonesia melalui BTPN yang diinisiasi oleh TPG ini berfokus pada data yang tersedia dalam kurun waktu 2008 hingga 2012 sesuai dengan fokus masalah yang penulis teliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian penulis membaginya dalam tiga bagian besar, yakni bagaimana kondisi perempuan di Indonesia terkait dengan pemberdayaan perempuan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Kedua, penulis akan menjelaskan program kredit mikro dilihat dari sisi Texas Pacific Group (TPG) yang menginisiasi program tersebut di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN). Dari kedua analisis tersebut, penulis akan memberikan peran investasi asing TPG di BTPN sebagai usaha nyata mewujudkan pemberdayaan perempuan di Indonesia dalam rentang waktu yang

menjadi batasan waktu penulis yakni 2008 - 2012.

1. Kondisi Perempuan di Indonesia

Sebagaimana disinggung di Bab Pendahuluan, Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi CEDAW berdasarkan UU RI No 7 Tahun 1984 berkewajiban untuk menjalankan isi dari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Hal ini juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasar hak asasi manusia dan kesetaraan. SDGs memiliki prinsip universal, integrasi dan inklusif. Salah satu prinsip SDGs adalah meyakinkan dalam pembangunan berkelanjutan tersebut tidak ada satupun yang tertinggal atau no one left behind (Bappenas, 2020). Melihat prinsip kesetaraan dan semangat no one left behind patut disimak bagaimana gambaran umum kondisi perempuan di Indonesia.

Perbedaan upah rata-rata perempuan dan laki-laki menunjukkan adanya ketidakadilan terhadap perempuan secara umum. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa upah perempuan lebih sedikit daripada laki-laki meskipun tugas dan kewajibannya sama. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyatakan gaji perempuan lebih rendah 11 - 20 persen dibanding laki-laki. Kondisi ini terjadi di hampir tiap di negara di seluruh belahan dunia (Audriene, 2021).

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) berdasarkan hasil survei nasional terdapat keseimbangan antara penduduk produktif laki-laki dan perempuan, yaitu 66,11 persen berbanding 65,36 persen. Meski jumlahnya seimbang, namun kualitas hidup perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. Potensi kuantitatif dari SDM perempuan Indonesia belum diimbangi dengan potensi kualitatif yang seimbang. Rendahnya kualitas hidup perempuan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia secara keseluruhan, terutama di bidang-bidang utama seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Berdasarkan data dari Human Development Report UNDP 2011 bahwa Human Development Index (HDI) Indonesia pada 2011 adalah 0,617 yang berada pada urutan 124 dari 187 negara. Angka tersebut turun dibanding pencapaian HDI Indonesia di tahun 2010 yang berada di urutan 108 dari 169 negara.

Sementara Gender Inequality Index (GII) Indonesia tahun 2011 sebesar 0,505 yang berada di peringkat 100. Pada 2008 indeks GII Indonesia 0,714 berada di urutan 108 dari 139 negara. Hal ini menunjukkan kondisi kualitas masyarakat Indonesia masih rendah dan perempuan yang secara ekonomi berpotensi, menjadi beban pembangunan. Kondisi ini disebabkan oleh perempuan yang masih terkungkung oleh keterbatasan yang diciptakan terstruktur, kultural, dan alamiah. Meskipun indeks GII

Indonesia memiliki nilai yang cukup baik namun hal tersebut tidak sejalan dengan kesetaraan gender pada pasar tenaga kerja Indonesia. Berdasarkan publikasi International Labour Organization (ILO) tentang pasar tenaga kerja Asia Pasifik tahun 2011, Indonesia menempati posisi pertama negara yang kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerjanya lebih besar dari 30 poin persentase serta pengangguran di kalangan tenaga kerja perempuan (Dwiyanti, 2014).

Perlu diingat bahwa pada periode 2008 - 2009 Indonesia mengalami dampak krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat, namun Indonesia dapat bertahan dari krisis tersebut karena sektor informal Indonesia yang kuat. Pada 2008 - 2009 terjadi lonjakan besar tenaga kerja pada sektor informal, yaitu dari 67,14 persen pada 2008 meningkat ke 69,49 persen pada 2009. Mulai dari sini sektor informal memiliki kedudukan penting bagi kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia. Melalui perspektif gender, proporsi tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan di sektor informal 40 persen berbanding 60 persen untuk perempuan dan laki-laki. Secara umum proporsi tersebut lebih baik dibanding proporsi di sektor formal yang sebesar 32 persen perempuan dan 68 persen laki-laki (KemenPPA, 2012).

Sektor informal bagi perempuan merupakan penyumbang lapangan pekerjaan terbesar yang mencakup 70 persen dari keseluruhan tenaga kerja

perempuan. Fakta tersebut memunculkan adanya dua indikasi, pertama perempuan umumnya memiliki keterbatasan akses untuk masuk ke dalam sektor formal meski kebijakan kesetaraan gender telah lama dilaksanakan. Kedua, perempuan umumnya masuk ke sektor informal dengan pertimbangan khusus seperti adanya kemudahan, keleluasaan, dan fleksibilitas bekerja di sektor informal dibanding bekerja di sektor formal. Salah satu pertimbangan tersebut adalah perempuan yang memiliki tugas domestik yang harus dilakukan sebagai seorang istri dan ibu, atau beban ganda dalam rumah tangga.

Dari data tersebut merupakan hal umum bila perempuan bekerja pada sektor Usaha Kecil dan Mikro (UMK). Kemudian data mengenai usaha industri mikro dan kecil yang diperoleh dari hasil survei industri mikro dan kecil oleh BPS menunjukkan bahwa industri UMK merupakan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja. Yang dimaksud UMK adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1 - 4 orang (mikro) dan 5 - 19 orang (kecil). Industri UMK juga tidak mensyaratkan adanya jenjang pendidikan formal yang tinggi, sehingga penyerapan tenaga kerja di sektor UMK ini cukup besar dibandingkan sektor lain (BPS, 2010).

Keterlibatan perempuan dalam ketenagakerjaan tidak hanya menarik untuk dilihat dari sisi perempuan sebagai pekerja, namun juga menarik dilihat dari sisi perempuan sebagai

pengusaha. Hal tersebut menunjukkan peran penting perempuan yang sudah mampu untuk mandiri bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dalam hal ini kelompok usaha industri mikro dan kecil merupakan usaha yang paling banyak digeluti oleh pengusaha-pengusaha perempuan. Berdasarkan hasil survei industri mikro dan kecil pada tahun 2010, terdapat 2.732.724 usaha UMK yang tersebar di 33 provinsi. Keterlibatan perempuan perempuan dalam ketenagakerjaan sebagai pengusaha menunjukkan jumlah yang cukup sebanding dengan laki-laki sebagai pengusaha, yaitu perempuan pengusaha UMK 41,40 persen dan laki-laki pengusaha UMK sebesar 58,60 persen (BPS, 2010).

Dari data-data yang disebutkan di atas, maka pemberdayaan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi merupakan bagian penting dari pemberdayaan perempuan yang Pemerintah Indonesia canangkan sendiri. Berbagai macam upaya pemberdayaan perempuan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia pasca meratifikasi Konvensi CEDAW dan program SDGs, melalui paket kebijakan, upaya yang telah dilakukan oleh kementerian terkait serta stakeholder lain. Hal umum bila pemerintah menggandeng atau memerlukan bantuan swasta untuk memberdayakan perempuan. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) adalah salah satu bank yang ikut memberdayakan perempuan Indonesia melalui program penyaluran kredit mikro yang

dikeluarkan.

2. UMK Perempuan dan Kredit Mikro BTPN 2008 - 2012

a. Sekilas Texas Pacific Group (TPG) dan BTPN

Texas Pacific Group atau disingkat TPG merupakan perusahaan investasi yang berdiri tahun 1992 oleh David Bonderman, Jim Coulter, dan William S. Price III di San Fransisco, California (TPG, 2020). TPG adalah salah satu perusahaan investasi swasta yang terbesar dan terkemuka di Amerika dan dunia. Dalam melakukan investasi, TPG berinvestasi pada banyak instrumen strategis seperti investasi pada surat hutang perusahaan, perusahaan, venture capital dan perusahaan terbuka (Dallas News, 2019). Mayoritas pendanaan TPG berasal dari dana pensiun, perusahaan asuransi, individu berpenghasilan tinggi, dana kekayaan negara, dan investor institusional lainnya. Maka dari itu dari sisi bentuk TPG merupakan sebuah private equity. Private equity merupakan sebuah perusahaan investasi yang mengumpulkan dana dari pihak-pihak privat untuk diinvestasikan. Dana tersebut diinvestasikan pada instrumen investasi yang tidak diperdagangkan secara publik atau instrumen privat, atau investasi langsung yang bersifat strategis pada perusahaan, baik publik maupun privat dengan ciri utama dengan horizon investasi jangka panjang (Frindos, 2017).

TPG secara umum menjalankan

investasinya sebagai investor aktif maupun pasif. (Geczy, 2020) mengemukakan investasi pasif adalah strategi investasi dengan membeli dan menahan saham atau obligasi baik di pasar uang maupun pasar modal dengan hanya berharap pada apresiasi harga atau imbal hasil dari investasi yang ditanamkan. Di kawasan Asia, TPG telah aktif beroperasi sejak tahun 1994 dengan menjadi pemegang saham perusahaan sektor keuangan, seperti Korea First Bank, Korea Selatan; Shenzen Development Bank, China; Shriram Capital, India; Taishin Bank, Taiwan; Bank Thai, Thailand, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Indonesia (BTPN, 2008).

TPG memercayakan pengalangan dana investasinya di Indonesia pada Northstar mulai mengembangkan bisnis BTPN menjadi bank yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Jika sebelumnya BTPN hanya melayani kegiatan perbankan nasabah pensiunan saja, pada 2008 BTPN mulai menggarap pembiayaan mikro, kecil, dan menengah atau UMKM (BTPN, 2008). Memanfaatkan 15 tahun pengalamannya berinvestasi di perusahaan jasa keuangan TPG melalui BTPN menyalurkan kredit lunak untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sejak program tersebut dibuka, BTPN mampu menumbuhkan basis nasabahnya menjadi lebih dari 2 juta dengan program pinjaman berkelompok dan menjangkau 250.000 usaha mikro, kecil, dan menengah.

PT Bank BTPN Tbk (BTPN) didirikan

di Bandung pada 5 Februari 1958 dengan nama Bank Pegawai Pensiunan Militer (Bapemil). Pada awalnya merupakan bank dengan status usaha sebagai badan perkumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggotanya. Bapemil bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi para pensiunan, baik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) maupun masyarakat sipil (BTPN, 2009). Dengan kepercayaan dari masyarakat utamanya mitra usaha, pada 1986 para anggota Bapemil membentuk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional dengan ijin usaha sebagai Bank Tabungan. Pada 1993 status BTPN menjadi Bank Umum.

Tahun 2008 merupakan salah satu tahun penting bagi BTPN dengan berbagai pencapaian. Pada 12 Maret 2008 BTPN sukses melakukan go public dengan melepas saham milik Pemerintah Indonesia melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebesar 28,39%. Sementara pada 14 Maret 2008, TPG Nusantara S.a.r.l mengakuisisi 71,6% saham BTPN, sehingga menjadi pemegang saham pengendali BTPN. Pada kuartal ketiga 2008, BTPN mengembangkan usahanya menuju segmen market yang baru, yaitu pembiayaan usaha mikro kecil dan unit usaha syariah. BTPN membuka 46 cabang BTPN Mitra Usaha Rakyat dan 2 cabang syariah di Bandung dan Jakarta (BTPN, 2008).

Jerry Ng, Direktur Utama BTPN dalam (BTPN, 2008) menyebut bahwa

TPG tetap berkomitmen atas pengembangan usaha inti BTPN yaitu kredit pensiun namun juga memberikan dukungan penuh arah strategi BTPN yang baru yaitu mendorong proses transformasi pembentukan usaha inti baru yaitu BTPN Mitra Usaha Rakyat dan Unit Usaha Syariah. Untuk mendukung langkah tersebut BTPN menerbitkan obligasi Rupiah jangka panjang pertamanya pada 2009. Penerbitan obligasi merupakan salah satu cara yang biasa dilakukan perusahaan untuk mendapat modal usaha. Ceruk bisnis kredit mikro dan kecil sangat besar, sehingga lini bisnis pembiayaan mass-market menjadi fokus utama BTPN pada tahun 2009 (BTPN, 2009).

b. Permasalahan yang Dihadapi Perempuan

Secara aktif, pemerintah telah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KemenPPA) berkomitmen untuk memberdayakan perempuan Indonesia. Pada tahun 2000, KemenPPA melaksanakan percontohan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL) di lima provinsi dan sepuluh kecamatan, dua kecamatan untuk masing-masing provinsi yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Program ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan melalui kegiatan ekonomi produktif sekaligus mengembangkan ekonomi lokal. Adapun dalam upaya melalui program, proyek dan kegiatan yang bertujuan memberdayakan

perempuan ini dilakukan oleh lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah baik lokal maupun internasional, perusahaan dan koperasi, perbankan, lembaga donor, dan lembaga lainnya.

Pada kurun 2002 - 2004 KemenPPA menetapkan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) sebagai prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, di samping upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan perempuan, kualitas pendidikan, serta penghapusan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penetapan prioritas ini berkaitan dengan fakta bahwa kemiskinan senantiasa berdampak langsung pada perempuan dan anak. Salah satu upaya pemberdayaan perempuan adalah dengan meningkatkan peranan dan keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini baik pemerintah maupun swasta telah mengupayakan program pelatihan kerja bagi perempuan dan memberikan kredit usaha bagi perempuan. Bekal keterampilan dari pelatihan kerja akan meningkatkan kemampuan dan peluang bagi perempuan dalam partisipasi aktif mereka di dalam ekonomi. Padahal ketika keterampilan bertambah ditambah dengan bantuan modal umumnya akan membuat perempuan lebih sejahtera.

Perempuan memiliki permasalahan berbagai jenis dalam lingkungan yang patriarkis. Namun, umumnya dalam bidang ekonomi khususnya kegiatan

usaha dibagi menjadi empat kelompok. Kelompok tersebut yakni, perempuan yang tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan, perempuan yang belum/tidak berusaha, perempuan pengusaha mikro, dan perempuan pengusaha kecil dan menengah. Tentu dalam usaha memberikan solusi atas empat kelompok perempuan tersebut harus sesuai dengan karakteristik masalahnya masing-masing dengan pendekatan kultural, struktural, dan alamiah. Sebagaimana penyebabnya kemiskinan di antara kaum perempuan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Permasalahan yang dihadapi perempuan dari berbagai macam kelompok ini garis besarnya memiliki permasalahan utama yang intinya sama, yaitu;

i. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Rendah

Pada suatu kesempatan, Dr. Sulikanti Agusni Msc, Deputy Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi KPPPA menyatakan, perempuan memiliki potensi besar di bidang perekonomian namun memiliki keterbatasan akses informasi dan dari diri perempuan sendiri tidak memiliki rasa percaya diri karena adanya budaya patriarki (Setiawan, 2015). Padahal kontribusi UMK dalam perekonomian nasional tidak diragukan lagi karena menyerap tenaga kerja, berkontribusi besar pada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, nilai ekspor dan investasi nasional. Sektor UMK memiliki kontribusi ekonomi dan

pembangunan Indonesia, padahal sektor ini di dalamnya tidak terlepas dari peran serta perempuan. Lebih dari 50 persen pelaku usaha UMK merupakan perempuan.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) pada 2012 yang mengadakan pemetaan UKM Perempuan di 18 provinsi juga memberikan gambaran yang sama bahwa informasi pasar dan teknologi menjadi kelompok perempuan pengusaha UKM untuk maju dan bersaing dengan pengusaha lainnya. Sementara pada pertemuan internal Kemenkop mendapat kesimpulan perlunya peningkatan kualitas dan perbaikan teknologi produk-produk UMK (Nursiah, 2012). Produk-produk UMK umumnya bersifat tradisional selain kurang bersaing dengan industri atau produk sejenis yang diproduksi perusahaan swasta atau multinasional. Jika pun produk UMK tersebut unik dan spesifik, kurangnya informasi yang mumpuni menimbulkan banyak pelaku UMK yang rawan diculik hak intelektual atas produk-produknya.

ii. Minimnya Sumber Daya Modal

Akses ke sumber daya modal adalah hal yang tak bisa dikesampingkan dari pemberdayaan UMK. Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan pada 2012 mencatat menurut Badan Pusat Statistik jumlah tenaga kerja UMK sebesar 107,6 juta pekerja atau 97 persen dari jumlah pekerja di Indonesia. Maka pemerintah mendorong pemanfaatan fasilitas pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMK

melalui bank umum. Program KUR berhasil meningkatkan akses UMK terhadap fasilitas kredit perbankan. Di mana penggunaan KUR tersebut sebanyak 73 persen digunakan untuk tambahan modal kerja, sementara sisanya untuk investasi (Abidin, 2015).

Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak dan menemukan bahwa akses UMK terhadap pembiayaan atau kredit adalah hal yang vital. Peneliti (Putra & Mustika, 2014) melakukan pengamatan terhadap program yang digulirkan oleh pemerintah melalui lembaga Jamkrida. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) merupakan program yang memberikan jaminan kredit dalam upaya membantu permodalan UMK. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Jamkrida di Kabupaten Tabanan. Hasil dari pembahasan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa; pelaksanaan program Jamkrida di Tabanan sangat efektif; program Jamkrida mendorong pendapatan UMK yang ujungnya menambah tenaga kerja secara efektif.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Sholhuddin, 2013) lebih fokus pada peran serta pemerintah pusat dan sektor perbankan khususnya perbankan syariah. Penelitian tersebut menunjukkan perbankan syariah mengambil peran strategis untuk pengembangan dan kemajuan UMK melalui fasilitas kredit yang diberikan. Kemudian, perbankan syariah juga memiliki support system yang kuat

dalam masalah pendampingan teknis dan non teknis. Namun peran serta perbankan syariah dalam penelitian tersebut dinilai terlalu banyak pihak mempunyai ekspektasi terlalu besar terhadap peran perbankan syariah terhadap UMK namun secara sistem masih menjadi tantangan.

C. Peran Investasi Asing TPG di BTPN

Pasca akuisisi ini TPG pada 2008, TPG menjadi pemegang saham mayoritas BTPN. Pemegang saham mayoritas adalah orang atau badan yang memiliki lebih dari 50 persen saham beredar dalam perusahaan. Sebagai pemegang saham mayoritas, seseorang atau entitas operasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam berlangsungnya sebuah perusahaan dan dapat mengendalikan perusahaan tersebut (Goh et al., 2013).

Sebelum BTPN dikendalikan oleh TPG, selama lebih dari 50 tahun bisnis pensiun merupakan bidang usaha yang menjadi fokus utama dari BTPN. Pondasi bisnis model pensiun BTPN adalah jasa pembayaran Tunjangan Hari Tua dan pembayaran pensiun bulanan melalui pola kerjasama dengan mitra usaha strategis, utamanya PT TASPEN yang mengelola dana tabungan dan asuransi pegawai negeri (milik pemerintah atau BUMN), dan Dana Pensiun antara lain Dana Pensiun Pertamina, Dana Pensiun Telkom, dan Dana Pensiun Perhutani (Jerry dalam BTPN, 2008). BTPN sejak awal berdiri pada 1956 hingga 2008 merupakan bank yang memiliki fokus pada

pelayanan nasabah pensiun karena memiliki jaringan cabang, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang khusus pada segmentasi nasabah pensiunan. Bisnis pensiunan menjadi pilar utama bagi BTPN menjalankan usahanya selama lebih dari 50 tahun.

Pasca TPG menjadi pemegang kendali BTPN pada 2008, TPG berkomitmen terus mengembangkan bisnis dana pensiunan namun di sisi lain akan melaksanakan transformasi baru yaitu mengembangkan usaha ke Usaha Mikro Kecil (UMK) dan pendanaan ritel. Transformasi ini dijalankan dengan tiga lini usaha yaitu Unit Usaha Syariah, BTPN Mitra Usaha Rakyat, dan Layanan Pendanaan Ritel. Dari tiga hasil dari transformasi bisnis ini para perempuan pengusaha UMK terlayani oleh dua lini bisnis, yaitu Unit Usaha Syariah dan BTPN Mitra Usaha Rakyat. Unit Usaha Syariah merupakan unit usaha yang mengembangkan produk-produk syariah untuk melayani nasabah inti BTPN, para pensiunan dan pelaku UMK. Sementara BTPN Mitra Usaha Rakyat merupakan bisnis yang dirancang khusus untuk melayani sektor UMK.

BTPN Mitra Usaha Rakyat diluncurkan pada 20 November 2008 dan mendapat respon positif dari para pelaku pengusaha UMK. Hingga Maret 2009, BTPN merekrut 2.200 karyawan baru, melakukan 22.000 hari pelatihan bagi para pengusaha UMK dan membuka 107 cabang baru di seluruh Indonesia. BTPN Mitra Usaha Rakyat mendapat 16.000 nasabah baru yang merupakan

pengusaha UMK yang memberikan pinjaman Rp 351 miliar dan menerima simpanan Rp 38 miliar. Menurut laporan tahunan (BTPN, 2008) bisnis UMK yang ditekuni BTPN memiliki rasio kredit bermasalah yang rendah. Lebih-lebih, UMK merupakan sektor yang mampu bertahan dalam kondisi ekonomi paling buruk sekalipun. (Widyaningrum, 2020) menyatakan UMK dapat bertahan dari kondisi ekonomi paling buruk misal krisis keuangan 2008 karena keterbatasan UMK dengan pasar global, tidak adanya hutang atau investasi yang diambil UMK dari pasar global, dan orientasi UMK yang menysasar pasar lokal.

Kekuatan sektor UMK ini tak dapat dipungkiri yang dilihat TPG dari kacamataanya sebagai investor untuk mengembangkan pelayanan kredit mikro melalui dua produk barunya, yaitu Unit Usaha Syariah dan BTPN Mitra Usaha Rakyat. Mengingat data yang menunjukkan UMK merupakan sektor yang didominasi oleh perempuan maka secara langsung maupun tidak langsung pengembangan dua usaha baru BTPN berdampak pada ekonomi perempuan di Indonesia. Namun sejauh mana dampak inisiasi TPG di BTPN yang mengarahkan perusahaan ke segmentasi pendanaan mikro bagi pelaku UMK. Kondisi riil tentu dapat dilihat dari kredit yang diberikan ke UMK dan pertumbuhannya.

Tabel 2. Penyaluran Kredit BTPN ke UMK (Rupiah)

2008	2009	2010	2011	2012
------	------	------	------	------

35 M	2,3 T	4,6 T	6,8 T	9 T
80.00 N	117.00 N	204.00 N	213.00 N	232.00 N

Sumber: Laporan Tahunan BTPN 2010 - 2012

Keterangan:

M : Miliar
 T : Triliun
 N : Nasabah

Perbankan adalah salah satu motor penggerak ekonomi yang memiliki peran strategis dalam menumbuhkan dan mengembangkan sektor usaha kerakyatan, meningkatkan kemampuan ekonomi usaha, dan sebagai sumber pendanaan (Anton dalam Ekon, 2016). Data pendanaan BTPN ke sektor UMK yang bertumbuh dari tahun 2008 ke 2012 merupakan sinyal positif terhadap perkembangan sektor ini di tahun-tahun tersebut. Sinyal positif ini dapat dilihat dari pendanaan ke sektor UMK yang naik nominalnya, juga dari sisi UMK yang menjadi mitra nasabah BTPN. Rasio kredit ke UMK dari BTPN yang tumbuh seperti yang ditunjukkan pada data tersebut tentu berdampak ke UMK yang ikut berdaya.

Selain membantu dari sisi pembiayaan usaha, BTPN juga memberikan sejumlah pelatihan yang mencakup tiga kelompok tingkatan usaha, dan untuk tiap tingkatan terdapat lima modul; membangun mentalitas wirausaha, manajemen dasar keuangan, operasional bisnis, pemasaran dan pengelolaan sumber daya manusia (BTPN, 2012). Pada tahun 2011, BTPN melalui Unit Usaha Syariahnya melakukan program uji coba BTPN Syariah - Tunas Usaha Rakyat (TUR). Program tersebut bertujuan untuk memberdayakan keluarga pra-sejahtera produktif melalui dua komponen utama

yaitu pemberdayaan perempuan dan pengembangan empat perilaku efektif, yakni keberanian, disiplin, kerja keras dan solidaritas.

Program TUR ini dirancang lebih khusus lagi untuk melayani perempuan di mana memberi empat elemen. Elemen pertama adalah memberikan solusi keuangan dalam bentuk paket pembiayaan, umumnya kepada sekelompok wanita yang sudah atau ingin berusaha di pedesaan namun tidak memiliki akses ke perbankan. Paket pembiayaan diberikan mulai dari Rp 1 - 3 juta dan dilunasi dengan cicilan setiap dua minggu dalam waktu setahun. Jika di akhir periode kelompok nasabah wanita tersebut dapat melunasi penuh pembiayaannya, maka dapat mengajukan kredit lagi dengan jumlah yang lebih besar hingga 100% di atas plafond kredit sebelumnya.

Elemen kedua dalam program ini adalah aspek solidaritas di antara sesama anggota kelompok. Pengajuan dan pemberian kredit dilakukan dalam satu kelompok yang maksimal terdiri dari lima orang (Khoer, 2013). Hingga maksimum lima orang anggota disyaratkan menghadiri perempuan formal dua mingguan dengan staf BTPN. Dalam pertemuan formal dengan staf BTPN ini para anggota didorong untuk membagi tanggung jawab dan mempromosikan solidaritas kerja sama anggota kelompok. Di dalam pertemuan ini pula kelompok wanita tersebut diberi pelatihan dan keterampilan sesuai modul yang telah dijelaskan di awal. Hal ini bertujuan untuk menambah daya tawar produk yang dihasilkan oleh perempuan dalam kelompok tersebut.

Kemudian elemen ketiga adalah partisipasi anggota kelompok dalam program binaan, di mana kelompok yang mengambil paket pembiayaan

disyaratkan untuk mempertahankan saldo wajib simpanan dan mengambil modul manajemen keuangan yang khusus didesain untuk nasabah TUR. Sementara elemen terakhir adalah karyawan BTPN bertindak sebagai fasilitator dan menjadi contoh teladan bagi nasabah TUR mengharuskan bersikap jujur, sopan, dan disiplin.

Jika dicermati sekilas, program ini memiliki corak yang sama dengan pembiayaan mikro oleh Grameen Bank di Bangladesh. Persamaan utama tentunya merupakan antara program kredit mikro ramah perempuan TPG di BTPN dengan Grameen Bank adalah target utama mereka yakni perempuan. Akses perempuan ke tabungan dan kredit memberi mereka peran ekonomi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan melalui keputusan mereka tentang tabungan dan kredit. Ketika perempuan mengendalikan keputusan mengenai kredit dan tabungan, mereka akan mengoptimalkan sendiri dan rumah tangga kesejahteraan. Investasi dalam kegiatan ekonomi perempuan akan meningkatkan kesempatan kerja bagi perempuan dan sehingga memiliki efek rantai yang masif. Paradigma keuangan keberlanjutan dan pemberdayaan feminis menekankan kegiatan yang menghasilkan pendapatan perempuan sendiri. Di dalam paradigma pengentasan kemiskinan, penekanannya lebih pada meningkatkan pendapatan di tingkat rumah tangga dan penggunaan pinjaman untuk konsumsi (Dhanonjoy, et al., 2013).

Program pembiayaan kredit mikro Grameen Bank di Bangladesh mampu menstimulus perempuan miskin pengusaha mikro di Bangladesh untuk meningkatkan pendapatan mereka. Efek lanjutan dari pendapatan mereka yang meningkat adalah mereka dapat memberdayakan diri mereka sendiri dan

memberi dampak nyata ekonomi bagi ekonomi keluarga. Secara nasional, efek masif dari kredit mikro Grameen Bank di Bangladesh ini mampu memberdayakan perempuan miskin. Pada Oktober 2011, Grameen Bank memiliki 8,349 juta peminjam, 97% di antaranya adalah perempuan. Dengan 2.565 cabang, GB menyediakan layanan di 81.379 desa, meliputi lebih dari 97% dari total desa di Bangladesh (Grameen Bank, 2012). Alhasil, perempuan miskin sebagai kelompok rentan yang tidak memiliki akses terhadap perbankan mampu meningkatkan kapasitasnya sebagai perempuan berdaya.

Kembali ke BTPN, program TUR adalah program pembiayaan ramah perempuan. Kredit yang ramah bagi perempuan ini merupakan hal penting untuk pemberdayaan perempuan khususnya melalui ekonomi bila berkaca pada efek masif Grameen Bank di Bangladesh. Harapan BTPN melalui skema penyaluran kredit yang ramah perempuan akan berkontribusi pada upaya pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, karena perempuan memiliki potensi dan hak yang sama dengan laki-laki. Di BTPN sendiri, kredit mikro bagi perempuan pengusaha UMK ini dilakukan dengan syarat yang mudah, yakni;

1. Dilakukan dengan skema 'tanggung-renteng', artinya bilamana ada salah satu anggota kelompok yang mengalami kemacetan dalam pengembalian kredit, maka hal itu menjadi tanggung jawab bersama anggota kelompok lainnya (Saripudin, 2013). Pada program kredit mikro BTPN yang bernama BTPN Syariah - Tunas Usaha Rakyat maksimal anggota kelompok adalah lima orang.

2. Kredit dapat diajukan meski tidak memiliki agunan. Merupakan sebuah

kewajaran bila bank pada umumnya meminta agunan kepada kreditur sebelum kredit dapat dicairkan. Faktor ketiadaan agunan ini yang membuat perempuan tidak berani mengajukan kredit di perbankan.

3. Tidak memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk kredit dalam kelompok maksimal Rp 1 - 3 juta tidak diperlukan adanya NPWP, kecuali jumlah plafond pinjamannya melebihi nominal tersebut.

4. Bila belum memiliki rencana bisnis yang matang bukan suatu masalah. Menurut laporan tahunan (BTPN, 2012) karena program ini dijalankan dalam satu kelompok dengan prinsip solidaritas maka rencana bisnis yang matang dapat disusun setelahnya. Pun memang inisiasi program ini adalah untuk membentuk keberanian untuk memulai bisnis antara anggotanya.

5. Bank yang mendekati ke nasabahnya. Seluruh kegiatan penyaluran kredit mikro dalam kelompok perempuan ini dibuat sesederhana mungkin. Mengingat targetnya adalah perempuan pedesaan maka staf yang datang untuk membantu kegiatan dalam kelompok. Proses pengajuan, pertemuan wajib dua mingguan, pembayaran cicilan, dan proses pendampingan usaha dapat dilakukan di mana saja - tidak harus di cabang BTPN.

Hal-hal di atas menjawab permasalahan akses perempuan terhadap kredit perbankan. Aspek kemudahan mengakses kredit ini merupakan hal yang penting bagi pemberdayaan perempuan melalui ekonomi (KemenPPA, 2012). Terlebih BTPN dalam hal ini tidak hanya memberikan program kredit mikro saja melalui dua produknya, Unit Usaha Syariah dan BTPN Mitra Usaha Rakyat

yang diluncurkan pada tahun 2008. Rekomendasi dari Komite CEDAW sesuai laporan pelaksanaan CEDAW pada 2011 adalah menggiatkan pemerintah Republik Indonesia untuk memperkuat sosialisasi instrumen Hak Asasi Manusia, khususnya CEDAW kepada berbagai pemangku kepentingan (kelompok agama, budaya, pelaku bisnis, dan lain-lain), termasuk aparat pejabat negara (Chuzafah & Venny, 2019). BTPN yang dalam hal ini adalah pelaku bisnis, sebagai pihak yang menyalurkan kredit mikro ramah perempuan adalah salah satu contoh pihak bisnis yang menjalankan rekomendasi CEDAW tersebut.

TPG adalah pemegang saham mayoritas BTPN pada 2008 - 2012 sebagai pihak yang menginisiasi layanan terhadap nasabah mikro. Hal ini ditegaskan dalam laporan tahunan mereka pada 2012, di mana '*BTPN is a bank that focused on serving and empowering the lower-income population*' atau BTPN adalah bank yang berfokus pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam hal ini, memang TPG melalui tidak secara gamblang atau eksplisit memposisikan diri mereka sebagai aktor internasional yang peduli akan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Keputusan investasi mereka di BTPN yang kemudian mengubah lini bisnis baru yaitu pelayanan terhadap nasabah mikro melalui Unit Usaha Syariah dan BTPN Mitra Usaha Rakyat semata adalah keputusan bisnis (TPG, 2012). Namun, di dalam produk perbankan hasil inisiasi TPG ini mampu melahirkan program kredit mikro ramah bagi perempuan di Indonesia pada umumnya.

Peran penting TPG di BTPN mampu berkontribusi pada pembangunan perempuan di Indonesia dari tahun 2008 - 2012, terbukti dengan Tabel 4 di mana

alokasi kredit BTPN ke UMK yang naik dari tahun ke tahun. Hingga pada akhir 2012 TPG di BTPN, kredit ke UMK tersalurkan senilai Rp. 9 triliun ke 232.000 nasabah. Secara umum, modernisasi dipahami sebagai proses perubahan atau transformasi dari kehidupan bersama yang bersifat tradisional ke arah pola-pola sosial, ekonomi, dan politis yang telah berkembang di negara-negara Barat. Gerakan dan peristiwa modernitas yang utama adalah demokrasi, kapitalisme, industrialisasi, ilmu pengetahuan, dan urbanisasi (Terry Barret dalam Lan, 2015). Meski mungkin tidak secara langsung memahami rekomendasi CEDAW dalam proses investasinya di BTPN, program kredit mikro ramah perempuan yang BTPN layani sesuai dengan amanat Konvensi CEDAW pasal 13 yaitu jaminan kesetaraan dalam kehidupan sosial dan ekonomi bagi perempuan, khususnya menjamin akses kepada perbankan.

Secara konseptual, pemberdayaan berarti kekuasaan atau keberdayaan. Dalam hal ini (Ife dalam Rohmah, 2014) berpendapat bahwa pemberdayaan memuat elit kekuasaan dan kelompok lemah. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan individu, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam, a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan, bebas dari kebodohan dan kesakitan, b. menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya, dan c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan. Maka pemberdayaan adalah proses memberikan suatu keberdayaan bagi pihak yang tidak diuntungkan.

Pemberdayaan perempuan adalah program peningkatan kualitas perempuan, sebagai kelompok yang

rentan dalam masyarakat. Untuk melakukan pemberdayaan diperlukan adanya program peningkatan kualitas SDM, salah satunya melalui program peningkatan keterampilan (skill). Kegiatan pembangunan sendiri menurut (Sri Edi Swasono, 2010) meliputi beberapa hal, yaitu: (1) peningkatan pendapatan per kapita; (2) perluasan kemampuan masyarakat; (3) meningkatnya nilai tambah ekonomi dan nilai tambah sosio-kultural; (4) meningkatnya kepemilikan atau kekayaan masyarakat luas melalui partisipasi dan emansipasi pembangunan; dan (5) meningkatnya kadar keadilan bagi seluruh rakyat. Apabila semua itu terpenuhi maka pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat.

Bila menilik pada program kredit mikro ramah perempuan BTPN, telah dijelaskan bahwa kredit yang disalurkan berpihak kepada perempuan dengan skema tanggung renteng dan tanpa memerlukan jaminan. Syarat pengajuan kredit bagi UMK pun juga terhitung ramah dan mudah, sesuai yang telah dijelaskan. Pemberian pembiayaan pun dibekali dengan serangkaian peningkatan keterampilan bagi nasabahnya. Hal ini mendukung dalam agenda pembangunan, di mana peningkatan keterampilan dan pendapatan per kapita atau kesejahteraan merupakan tolok ukurnya.

Salah satu program peningkatan keterampilan BTPN adalah pendampingan bagi nasabah Tunas Usaha Rakyat (TUR) yang telah dijelaskan empat elemen utama dalam programnya yang dilakukan melalui model pendampingan. Model pendampingan tersebut dilakukan dengan terdapat staf khusus yang mendampingi kelompok perempuan nasabah TUR dalam proses kegiatannya. Di mana dalam

pendampingan tersebut nasabah TUR dapat saling berbagi informasi mengenai usahanya dan dibekali pendampingan usaha dan keterampilan dari staf BTPN yang ditunjuk. Proses pendampingan ini dilakukan secara inklusif dengan pertemuan wajib dua minggu sekali. Hal ini mendukung akselerasi pemberdayaan perempuan melalui ekonomi dan peningkatan keterampilan, khususnya bagi perempuan pengusaha mikro nasabah BTPN.

Kredit mikro yang tersalur pada periode 2008 - 2012 konsisten naik jumlah dana tersalurnya demikian pula dengan jumlah nasabah UMK dan juga cakupan nasabahnya. Dari Rp 35 miliar pada 2008 saat awal program diluncurkan dengan 80.000 nasabah UMK meningkat menjadi Rp 9 triliun dengan 232.000 nasabah UMK. Jumlah pinjaman dan nasabah yang meningkat menunjukkan hubungan kausalitas yang saling mendukung. Bank mendapat keuntungan dari kredit yang tersalur sementara nasabah UMK mendapat kredit ramah yang didapatkan untuk dialokasikan meningkatkan kapasitas usaha yang mereka jalani. Peningkatan keterampilan juga manajemen keuangan dan bisnis turut memberi kesempatan bagi perempuan pengusaha UMK tumbuh dan berkembang.

Meski sebagai sebuah entitas bisnis, penambahan lini bisnis baru pada 2008 saat BTPN dikuasai oleh TPG yang mendorong proses transformasi melayani usaha mikro kecil dan kredit ramah bagi perempuan di Indonesia. Melalui berbagai macam saluran kredit mikro yang disalurkan dapat menjangkau perempuan pada umumnya untuk mengakses kredit yang ramah bagi mereka, terlebih perempuan pengusaha UMK melalui BTPN Mitra Usaha Rakyat dan Tunas Usaha Rakyat. Sementara

nasabah perempuan yang bukan pengusaha mikro, atau belum memiliki sebuah usaha, didorong untuk berdaya melalui Unit Usaha Syariah. Di mana mereka dibekali serangkaian keterampilan bisnis dan semangat berusaha. Dalam Unit Usaha Syariah ini, nasabah diwajibkan membentuk kelompok sehingga kredit dapat mereka dapatkan tanpa jaminan - melalui skema tanggung renteng.

Dari hal yang telah disampaikan, maka keberadaan TPG di BTPN pada tahun 2008 - 2012 terbukti mentransformasikan BTPN dari yang sebelumnya melayani nasabah pensiunan menuju segmentasi baru yaitu layanan pendanaan mikro. Dampak dari transformasi bisnis ini, BTPN melayani nasabah UMK dan nasabah perempuan melalui Unit Usaha Syariah. Unique value proposition BTPN terletak pada cara pelayanannya yang menggabungkan antara misi bisnis dan sosial. Misi sosialnya adalah mengangkat UMK ke arah yang lebih baik lagi, dari sisi bisnis dan manajemen, serta misi untuk memberdayakan perempuan melalui skema kredit tanggung renteng dan serangkaian pertemuan formal wajib dua mingguan dalam kelompok perempuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Peran Investasi Asing Texas Pacific Group (TPG) di Bank BTPN Terhadap Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Studi Kasus Kredit Mikro BTPN 2008 - 2012, maka dapat disimpulkan dua poin poin bahwa:

1. Investasi asing yang dalam hal ini dilakukan oleh TPG di BTPN pada 2008 - 2012 terbukti membawa dampak pemberdayaan khususnya pemberdayaan ekonomi bagi

perempuan terbukti dari dua produk hasil inisiasi yaitu Unit Usaha Syariah dan BTPN Mitra Usaha Rakyat. Dampak pemberdayaan juga terlihat dari data di Tabel 4 yang menunjukkan penyaluran kredit yang naik dari awal inisiasi pada tahun 2008 sebesar 35 miliar ke 800 nasabah ke 9 triliun untuk 232.000 nasabah dengan sebaran nasabah yaitu dari Aceh sampai Nusa Tenggara Timur, dengan cakupan nasabah di 22 provinsi di Indonesia. Selain itu, serangkaian pelatihan kepada UMK dan kelompok perempuan yang dilakukan oleh BTPN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah bentuk pemberdayaan bagi perempuan.

2. Skema kredit melalui kelompok kecil sehingga menghasilkan modal sosial, atau 'tanggung-renteng' ini adalah satu solusi yang memudahkan perempuan untuk mendapatkan akses kredit ke perbankan. Kemudahan akses kredit ini merupakan hal yang penting bagi pemberdayaan perempuan mengingat berbagai kesulitan yang telah peneliti jabarkan untuk mendapatkan kredit karena ketiadaan agunan dan kepemilikan NPWP yang rendah. Skema ini terbukti jika dilihat dari Unit Usaha Syariah BTPN yang berkembang basis nasabah kelompok perempuannya yang menyumbang 20% dari total kredit yang diberikan oleh BTPN pada 2012.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. . (2015). *Kebijakan Fiskal dan Peningkatan Peran Ekonomi UMKM*.

- <https://www.kemenkeu.go.id/media/4392/kebijakan-fiskal-dan-peningkatan-peran-ekonomi-umkm.pdf>
- BTPN. (2008). *Laporan Tahunan BTPN 2008*.
<https://www.btpn.com/pdf/investor/annual-report/in/btpn-annual-report-2008.pdf>
- BTPN. (2010). *Laporan Tahunan BTPN 2010*.
<https://www.btpn.com/pdf/investor/annual-report/in/btpn-annual-report-2010.pdf>
- Burkett, L. B. & E. (n.d.). *Feminism*. Encyclopedia Britannica.
- Groves, J. C. and J. (2007). *Introducing Feminism*. Gutenberg Press.
- Sholhuddin, M. (2013). *Tantangan Perbankan Syariah dalam Perannya Mengembangkan UMKM*.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- Chuzaifah, Y., & Venny, A. (2019, July 24). *Komnas Perempuan*. Komnas Perempuan.
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-refleksi-35-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia-jakarta-24-juli-2019>
- Daeroby, A. (n.d.). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Replikasi Grameen Bank*.
https://www.academia.edu/download/33397109/PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT_MISKIN.pdf
- Dwiyanti, Y. H. (2014). *TELAAH PENENTU PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN JEMBER*.
<http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/58068>
- Geczy, C. C. (2020). *Active vs. Passive Investing: Which Approach Offers Better Returns*. Wharton Executive Education.
<https://executiveeducation.wharton.upenn.edu/thought-leadership/wharton-wealth-management-initiative/wmi-thought-leadership/active-vs-passive-investing-which-approach-offers-better-returns/>
- Goh, J., Lee, H. Y., & Lee, J. W. (2013). Majority Shareholder Ownership and Real Earnings Management: Evidence from Korea. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 24(1), 26-61.
<https://doi.org/10.1111/JIFM.12006>
- Jiménez, G., Ongena, S., Peydró, J. L., & Saurina, J. (2012). Credit Supply and Monetary Policy: Identifying the Bank Balance-Sheet Channel with Loan Applications. *American Economic Review*, 102(5), 2301-2326.
<https://doi.org/10.1257/AER.102.5.2301>
- Lan, T. J. (2015). *Perempuan dan Modernisasi. Masyarakat & Budaya*, 17.
- Nurherawati, S., Zulbahary, T., & Venny, A. (2018, July 24). *Siaran*

- Pers Komnas Perempuan*.
https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2018/SIARAN_PERS_2018/Siaran_Pers_Komnas_Perempuan_34_Tahun_Ratifikasi_Konvensi_CEDAW_di_Indonesia_24_juli_2018.pdf
- Nursiah, T. (2012). *Perilaku Kewirausahaan pada Usaha Mikro Kecil (UMK) di Bogor, Jawa Barat*.
<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/77573>
- Putra, G. S. P., & Mustika, M. D. S. (2014). Efektivitas Program Jamkrida dan Dampak Terhadap Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM. *E-Journal EKonomi*.
- Saripudin, U., Ekonomi, D., Stai, S., & Persada Bandung, B. (2013). *SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)*. 6(2).
- Setyasih Harini, Sumarmi, W. A. (2019). Manfaat Penggunaan Pranata Mangsa Bagi Petani Desa Mojoreno Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 2 (1), 82-97.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33541/ji.v2i1.1039>
- Siti, R. (2014). MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI GRASSROOT MICROFINANCE SYARIAH. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 10(1), 59-82.
<https://doi.org/10.21580/SA.V10I1.630>
- Susilawati. (2017). *Feminisme Gelombang Ketiga*. Jurnal Perempuan.
<http://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/feminisme-gelombang-ketiga>
- Tuwu, D. (2018). PERAN PEKERJA PEREMPUAN DALAM MEMENUHI EKONOMI KELUARGA: DARI PERAN DOMESTIK MENUJU SEKTOR PUBLIK. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 63-76.
<https://doi.org/10.31332/AI.V13I1.872>
- Audriene, D. (2021, March). Sri Mulyani: Gaji Perempuan Lebih Rendah 20 Persen dari Pria. *CNN Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210314091722-532-617188/sri-mulyani-gaji-perempuan-lebih-rendah-20-persen-dari-pria>
- DN. (2019, May 20). Buyout Giant TPG's Leader Weigh in Contrarian. *Dallas News*.
<https://www.dallasnews.com/business/local-companies/2019/05/20/buyout-giant-tpg-s-leaders-weigh-in-on-contrarian-dealmaking-s-past-present-and-future/>
- EKON. (2017). *Perbankan Sebagai Motor Penggerak Perekonomian - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*.
<https://ekon.go.id/publikasi/de>

tail/2488/perbankan-sebagai-
motor-penggerak-perekonomian

Frindos, R. (2017). *Mengenal Private Equity dan Venture Capital*.
<https://www.frindosonfinance.com/2017/08/14/mengenal-private-equity-dan-venture-capital/>

Khoer, M. (2013, July 17). Bank BTPN Catat 571.000 Nasabah Khusus Perempuan - Finansial Bisnis.com. *Bisnis*.
<https://finansial.bisnis.com/read/20130717/232/151465/bank-btpn-catat-571000-nasabah-khusus-perempuan>

Setiawan, S. R. D. (2015). Ini yang Menghambat Peran Perempuan di Bidang Ekonomi. *KOMPAS.Com*.
<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/04/09/070000520/Ini.yang.Menghambat.Peran.Perempuan.di.Bidang.Ekonomi>